

Implementation Of The People's Economy On Oil Palm Plantations In Tajurberas Village, Mentaya Hulu Sub-District, East Kotawaringin District

Impelementasi Ekonomi Kerakyataan Pada Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Tajurberas Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur

Libasul Ulum¹, Muhammad Hamdi²

Universitas Alfalah Assuniyyah^{1,2}

2144290169@inaifas.ac.id¹, hamdi@inaifas.ac.id²

*Corresponding Author

ABSTRACT

The people's economy is characterized by siding with the interests of the people. Why should we implement a people's economy, because in Indonesia, especially in Central Kalimantan, the number of poor people is currently reaching 142.170 million people in April 2024 (Central Statistics Agency). The oil palm plantation located in Tajurberas Village, Mentaya Hulu District, East Kotawaringin Regency, Central Kalimantan has implemented a people's economic system which began with a very low labor inequality and many people who needed work, therefore plantation owners had to employ people around the plantation to help with their work such as deforestation, oil palm planting, oil palm fertilizing and harvesting. The purpose of this study was to describe the practice of people's economy on oil palm plantations in Tajurberas Village, Mentaya Hulu District, East Kotawaringin Regency, and to analyze the contribution of oil palm plantations to the welfare of the local community using a qualitative descriptive method with a case study approach. The results of this study indicate that palm oil plantations based on the people's economy have a positive impact on increasing community income and welfare. The contract system and community involvement in the production chain are the keys to success in improving welfare. This study concludes that palm oil plantations can be an important source of livelihood for the community and make a real contribution to strengthening the community's economy.

Keywords: *People's Economy, Palm Oil Plantations, Community Welfare.*

ABSTRAK

Ekonomi kerakyataan dicirikan dari keberpihakan terhadap kepentingan rakyat banyak. Mengapa kita harus menerapkan ekonomi kerakyataan, karena di Negara Indonesia khususnya di Kalimantan Tengah saat ini jumlah rakyatnya yang miskin sebesar mencapai 142,170 juta orang pada pada April 2024 (Badan Pusat Statistik). Perkebunan kelapa sawit yang terletak di Desa Tajurberas Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah telah menerapkan sistem perekonomian kerakyataan yang di mana bermula dengan ketimpangan tenaga kerja yang sangat kurang dan banyak masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, maka dari itu pemilik perkebunan harus memperkerjakan masyarakat di sekitar kebun untuk membantu pekerjaannya seperti pembabatan hutan, penanaman sawit, pemupuk sawit dan pemanennya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktek ekonomi kerakyataan pada perkebunan kelapa sawit di Desa Tajurberas, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, serta menganalisis kontribusi perkebunan kelapa sawit terhadap kesejahteraan masyarakat setempat dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit berbasis ekonomi kerakyataan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Sistem borongan dan keterlibatan masyarakat dalam rantai produksi menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkebunan kelapa sawit dapat menjadi sumber penghidupan yang penting bagi masyarakat dan memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan ekonomi masyarakat.

Kata Kunci : *Ekonomi Kerakyataan, Perkebunan Kelapa Sawit, kesejahteraan masyarakat.*

1. Pendahuluan

Ekonomi kerakyataan mewakili kerangka perekonomian nasional Indonesia yang berakar pada nilai-nilai kekeluargaan, kedaulatan rakyat, dan prinsip moral Pancasila, serta menunjukkan

komitmen yang kuat terhadap kesejahteraan rakyat (Bhudianto 2012). Dimana keikutsertaan rakyat dalam segala aktivitas ekonomi akan mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Masyarakat yang melaksanakan kegiatan ekonomi berlandaskan sistem ekonomi kerakyatan yaitu dengan mengelola sumber daya ekonomi yang terdapat di lingkungan sekitar secara bijak dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.

Ekonomi kerakyatan dicirikan dari keberpihakan terhadap kepentingan rakyat banyak. Mengapa kita harus menerapkan ekonomi kerakyatan, karena di Negara Indonesia khususnya di Kalimantan Tengah saat ini jumlah rakyatnya yang miskin sebesar mencapai 142,170 juta orang pada pada April 2024 (Badan Pusat Statistik). Untuk itu perlunya pemanfaatan sebesar-besarnya sumber daya alam, sumber daya teknologi, sumber daya pemodal dan sumber daya manusia untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh (Bhudianto 2012).

Kemudian diperkuat oleh bapak Bung Hatta sebagai *founding father* (Bapak Pendiri) negeri ini telah meletakkan dasar-dasar sistem ekonomi syariah dalam dasar negara Indonesia yang dikenal sekarang menjadi ekonomi kerakyatan yang dulu dengan nama ekonomi Perkoperasian kemudian ekonomi Rakyat dan ekonomi Pancasila yang terletak pada landasan Negara Indonesia, yakni Pancasila (Ismail *et al.* 2024). Di dalam Pancasila telah disebutkan lima ciri dasar, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan sosial. Semua itu bersumber dari ajaran Islam, Karenanya, istilah ekonomi kerakyatan sebagai bangun usaha rakyat, dianggap paling sesuai dengan konsep pemberdayaan umat Islam yang mengedepankan prinsip keadilan, kejujuran, keterbukaan (transparansi), bertanggung jawab dan musyawarah.

Perkebunan merupakan basis ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, perannya sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional karena memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan dalam mewujudkan stabilitas negara. Pemberdayaan perkebunan kelapa sawit merupakan pilihan strategis untuk meningkatkan pendapatan kelompok berpenghasilan rendah guna mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan dengan meningkatkan kemampuan usaha dan keterampilan pengelolaan usaha (Ilmiah *et al.* 2025).

Perkebunan kelapa sawit yang terletak di Desa Tajurberas Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah telah menerapkan sistem perekonomian kerakyatan yang di mana bermula dengan ketimpangan tenaga kerja yang sangat kurang dan banyak masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, maka dari itu pemilik perkebunan harus memperkerjakan masyarakat di sekitar kebun untuk membantu pekerjaannya seperti pembabatan hutan, penanaman sawit, pemupuk sawit dan pemanennya. Sebagaimana hasil observasi dan wawancara awal yang dilakukan peneliti terhadap tiga pemilik perkebunan tersebut. Bapak Imam Mashuri berpendapat bahwasanya Ekonomi Kerakyatan ini akan terus beliau terapkan di perkebunan nya karena akan mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sedangkan menurut bapak Wardoyo industri kelapa sawit ini banyak melibatkan masyarakat mulai dari pembukaan lahan, penanam bibit, distribusi pupuk, pemanen dan peruning. Sedangkan menurut Mbah Nursito selaku pemilik memberikan tanggapannya tentang sitem perekonomian ini beliau berpendapat bahwa sisitem ini sangat relevan dengan tujuan beliau menanam kelapa sawit karna bisa membantu perekonomian masyarakat.

Dari uraian di atas tujuan yang akan dicapai oleh peneliti ialah bagaimana praktek Ekonomi kerakyatan pada perkebunan kelapa sawit di Desa Tajurberas Kecamatan mentaya Hulu kabupaten Kotawaringin Timur, bagaimana kontribusi perkebunan kelapa sawit terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Tajurberas Kelurahan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur.

2. Tinjauan Pustaka Ekonomi Kerakyataan

Ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan dan keinginannya yang tidak terbatas, sementara sumber daya yang tersedia sangat terbatas. Kondisi ini menuntut individu untuk membuat pilihan (*choices*) dan menyusun skala prioritas agar dapat mencapai kepuasan atau utilitas yang optimal. Meskipun seseorang telah memilih dengan pertimbangan matang dan melalui berbagai proses, tidak semua pilihan tersebut akan terpenuhi sepenuhnya. Hal ini disebabkan oleh adanya biaya peluang (*opportunity cost*) yang harus dipertimbangkan (Sugeng Riyadi dan Dewi Laela Hilyatin 2021).

Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang bertumpu pada kekuatan dan peran aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Sistem ini memberikan peluang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam aktivitas perekonomian, sehingga pelaksanaan dan perkembangan ekonomi dapat berjalan secara optimal. Tujuan utama dari ekonomi kerakyatan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan sangat penting dalam mendukung dan mengimplementasikan sistem ini demi kemaslahatan masyarakat luas (Nata and Haryono 2022).

Ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang mengutamakan kepentingan masyarakat luas dan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila serta asas demokrasi ekonomi, hal ini juga di paparkan oleh ahli Menurut Mubyarto (1999) sistem Ekonomi ini bersifat Demokratis, ditandai dengan semangat musyawarah, cita-cita gerakan rakyat, dan prinsip gotong royong, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Azzurri 2024). Secara konstitusional, konsep ini diperkuat oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi, yang mengedepankan asas kebersamaan, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, wawasan lingkungan, dan kemandirian (I A Pohan, A E Krisdayanti 2019).

Ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pelaku utama dalam kegiatan ekonomi, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sistem ini berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. Dalam konteks keterbatasan sumber daya dan kebutuhan yang tidak terbatas, ekonomi kerakyatan menjadi solusi strategis yang menekankan partisipasi, keadilan, dan gotong royong, dengan dukungan aktif dari pemerintah sebagai pemangku kebijakan.

Peran Perkebunan Dalam Ekonomi Kerakyatan

Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sektor strategis dalam penerapan ekonomi kerakyatan karena melibatkan partisipasi langsung masyarakat dalam proses produksi. Menurut Taryono (2012), pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan pendapatan wilayah dengan memanfaatkan komoditas lokal seperti kelapa sawit yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta pembangunan daerah (Adhar and Desfandi 2024).

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kinerja suatu perekonomian dari waktu ke waktu. Setiap negara dapat mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda di setiap periodenya. Perbedaan ini dipengaruhi oleh variasi jumlah dan kualitas faktor-faktor produksi yang tersedia. Selain itu, naik turunnya ketersediaan sumber daya alam di suatu wilayah juga turut memengaruhi perubahan tersebut. Menurut Arsyad (2000:56), pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan peningkatan pendapatan nasional riil, yaitu pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan harga tetap. Peningkatan pendapatan riil ini menunjukkan bahwa produksi barang dan jasa dalam suatu negara mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Dalam teori pertumbuhan ekonomi Neo-Klasik, dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh perkembangan faktor-faktor produksi seperti modal, tenaga kerja, dan teknologi (Parkah, Huda, and Perdana 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkebunan kelapa sawit memiliki peran strategis dalam mendukung ekonomi kerakyatan melalui keterlibatan langsung masyarakat dalam proses produksi. Selain itu, sektor ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, dan memanfaatkan potensi lokal. Pertumbuhan ekonomi sendiri dipengaruhi oleh perkembangan faktor-faktor produksi seperti modal, tenaga kerja, dan teknologi, yang juga menjadi dasar dalam pengelolaan sektor perkebunan secara berkelanjutan.

Penelitian terkait

Beberapa penelitian terdahulu turut memperkuat landasan teoritis serta relevansi ekonomi kerakyatan dalam konteks usaha rakyat:

- ✓ Tomi Agus Triono (2025) Penelitian ini menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat harus dilakukan dengan memanfaatkan dan mengembangkan potensi lokal yang ada di suatu wilayah. Pemberdayaan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga untuk menciptakan kemandirian dan keberlanjutan dalam pembangunan (Triono 2025).
- ✓ Sinta dan Agni Destriani (2025) mengkaji peran ekonomi kerakyatan dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia, dengan penekanan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal (Sinta; Agni Destrian 2025).
- ✓ Risma Yana Sari (2023) meneliti implementasi ekonomi kerakyatan dalam koperasi syariah serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip populis yang dapat dijadikan model bagi koperasi lainnya (Sinta; Agni Destrian 2025).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mendeskripsikan ekonomi kerakyatan pada perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Desa Tajurberas, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur. Lokasi penelitian ditentukan menggunakan *purposive area*, sedangkan sampel penelitian ditentukan menggunakan *purposive sampling* yang melibatkan 3 pemilik perkebunan dan 12 orang karyawan. Waktu penelitian berlangsung selama empat bulan, yaitu dari Januari hingga April 2025. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan sumber data primer dari informan dan data sekunder dari dokumen tertulis. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono 2019).

4. Hasil dan pembahasan

Historis Perkebunan Kelapa sawit

Tanaman kelapa sawit (*Elaeis guineensis*) berasal dari kawasan tropis Afrika Barat, khususnya wilayah Teluk *Guinea*. Tanaman ini mulai dikenal luas secara global sejak masa eksplorasi bangsa Eropa pada abad ke-15. Penggunaannya sebagai sumber minyak nabati mengalami perkembangan signifikan pada abad ke-19, seiring dengan revolusi industri yang meningkatkan kebutuhan bahan baku untuk industri pangan, kosmetik, dan manufaktur. Negara-negara kolonial seperti Inggris dan Belanda melihat potensi ekonomi dari tanaman ini, lalu memperkenalkannya ke berbagai wilayah tropis seperti Asia Tenggara dan Amerika Selatan untuk dibudidayakan secara komersial dalam skala besar (BESSE DINI INDRIANI 2025).

Di Indonesia, kelapa sawit pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1848 sebagai tanaman hias di Kebun Raya Bogor. Namun, dalam perkembangannya tanaman ini mulai dimanfaatkan secara ekonomi dan di budidayakan sebagai tanaman perkebunan, terutama di Pulau Sumatera dan Kalimantan yang memiliki kondisi iklim tropis yang sesuai. Ketika permintaan terhadap minyak sawit meningkat secara global, pemerintah Hindia

Belanda mengintensifkan budidaya kelapa sawit dan menjadikannya sebagai komoditas ekspor utama (Kurniadinata and Rahman 2025).

Pasca kemerdekaan, pemerintah Indonesia terus mendorong pertumbuhan industri kelapa sawit melalui berbagai kebijakan, seperti program transmigrasi dan pengembangan kemitraan antara petani kecil dengan perusahaan besar. Sejak dekade 1970-an, perluasan areal perkebunan sawit dilakukan secara masif di luar Pulau Jawa untuk meningkatkan produksi dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat (Hasid et al. 2022). Hingga saat ini, Indonesia menjadi produsen minyak sawit terbesar di dunia, bersama Malaysia, dengan kontribusi lebih dari 85% terhadap total produksi global. Industri ini tidak hanya menjadi sumber utama devisa negara, tetapi juga berperan penting dalam pembangunan ekonomi wilayah dan pemberdayaan petani (Anita 2024).

Tanaman kelapa sawit mulai dikenal dan ditanam secara bertahap di Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Kotawaringin Timur, sejak tahun 1956 hingga awal dekade 2000-an. Adapun keterlibatan aktif petani lokal dalam membudidayakan kelapa sawit baru berkembang secara signifikan sejak tahun 2009 dan terus mengalami peningkatan hingga kini. Faktor utama yang mendorong perkembangan ini adalah nilai jual kelapa sawit yang cukup menjanjikan dan memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat. Berdasarkan informasi dari Bapak Imam Mashuri yang memiliki 10 hektar lahan sawit, serta Mbah Nur dan Bapak Wasmono yang masing-masing mengelola sekitar 30 hektar dan 10 hektar kebun sawit mandiri, terlihat bahwa tanaman ini telah menjadi sumber penghidupan yang penting bagi petani. Kehadiran perkebunan juga turut berkontribusi dalam mendukung pengelolaan sawit masyarakat sekitar, yang mencerminkan bentuk keterlibatan korporasi dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui kemitraan usaha perkebunan yang berkelanjutan.

Pola Ekonomi Kerakyataan

Indonesia mulai menerapkan konsep Ekonomi Kerakyataan sejak masa reformasi tahun 1999. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia menetapkannya dalam ketetapan Nomor IV/MPR/1999 yang mengatur tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Pemerintah pusat mengadopsi konsep ekonomi kerakyataan sebagai sistem ekonomi nasional. Tujuan penerapan sistem ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara menyeluruh, dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam upaya pembangunan nasional yang demokratis, berpihak kepada rakyat, serta menegakkan keadilan sosial bagi seluruh warga negara (Styaningrum 2021).

Dari pernyataan Mubyarto, bahwa ekonomi kerakyataan merupakan sistem ekonomi yang demokratis yang bertujuan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Demokratis ekonomi mempunyai 3 sifat yaitu musyawarah, cita massa protes, dan tolong menolong (kolektif), penjabaran musyawarah disini ialah antara pemilik dan pekerja sama-sama memiliki hak atas tanggal panen untuk menjalin kerja sama yang baik antar dua belah pihak, sedangkan massa cita protes ialah apabila terjadi miskomunikasi antar dua belah pihak pekerja dianjurkan untuk memprotes hal tersebut agar tidak ada lagi miskomunikasi, sedangkan tolong menolong pada hal ini ialah pemilik perkebunan saat masa panen mengintruksikan para pekerja untuk memanen dengan kata yang baik agar terjalin ikatan kekeluargaan antar pemilik dan pekerjanya.

Dalam praktik di lapangan, para pemilik kebun pada umumnya mempekerjakan tenaga kerja melalui sistem borongan. Sistem ini dinilai memberikan sejumlah keuntungan bagi para pekerja, karena pelaksanaannya berbasis pada kerja tim (*teamwork*) dan hasil pendapatan dibagi secara merata oleh pemilik kebun kepada seluruh anggota kelompok kerja. Temuan ini sejalan dengan hasil wawancara awal yang dilakukan terhadap para pekerja di perkebunan mandiri, yang menyatakan bahwa sistem borongan mampu menciptakan efisiensi kerja sekaligus meningkatkan rasa keadilan dalam pembagian hasil. berikut tabel wawancara kepada sejumlah pekerja di perkebunan. Hal ini di perkuat lagi oleh Suyanto (2006) yang meyakini bahwa sistem

borongan adalah suatu bentuk hubungan kerja di mana upah diberikan berdasarkan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, bukan berdasarkan waktu kerja. Sistem ini dianggap mampu mendorong produktivitas pekerja karena pendapatan bergantung pada hasil kerja (Zahra Nurul Septila 2025).

Berikut tabel hasil wawancara peneliti terhadap 12 orang pekerja

Nama	Bekerja di kebun	Hasil
Bapak Suyatno	Imam Mashuri	Cukup Baik
Bapak Kadim	Imam Mashuri	Baik
Mas Ari	Imam Mashuri	Baik
Mas Mukhotim	Imam Mashuri	Cukup Baik
Bapak Tasdi	Mbah Nursito	Baik
Bapak Carlam	Mbah Nursito	Baik
Bapak Engkong	Mbah Nursito	Cukup Baik
Bapak Didi	Mbah Nursito	Baik
Bapak Nahroni	Bapak Wasmono	Baik
Mas Ari	Bapak Wasmono	Cukup Baik
Bapak Carlam	Bapak Wasmono	Baik
Bapak Fatah	Bapak Wasmono	Baik

Berdasarkan tabel hasil wawancara, sebanyak 12 Orang pekerja di perkebunan pribadi menyatakan bahwa keberadaan perkebunan kelapa sawit berbasis ekonomi kerakyatan sangat relevan dan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan mereka. Para pekerja yang sebelumnya hanya menggantungkan penghasilan Dari perusahaan saja kini memperoleh tambahan pendapatan melalui keterlibatan dalam perkebunan pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa model perkebunan pribadi memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan ekonomi masyarakat dan dinilai memiliki nilai keuntungan yang signifikan.

Keterlibatan Masyarakat dalam Rantai Produksi dan pendapatan

Dalam perkebunan kelapa sawit Bapak Imam Mashuri, Mbah Nur dan Wasmono ini mengadaptasi sistem ekonomi kerakyatan yang dimana masyarakat berperan sebagai pekerja dan para pemilik berperan sebagai pengolahan dana. dimana para pemilik perkebunan membagi tugas para pekerja agar menjalankan perkebunan dengan baik dan benar untuk itu ada beberapa peran masyarakat dalam mengelola perkebunan kelapa sawit seperti pembukaan lahan, perawatan, pemanenan, dan Pengumpulan. Berikut ialah tabel dari pendapatan masyarakat ketika bekerja di perkebunan pribadi :

peran masyarakat	Pendapatan
Pembukaan Lahan	Rp 750.000.00 per 1 Hektar
Tanam Lobang	Rp 355.000.00 per 1 Hektar
Perawatan	Rp 200.000.00 per 1 Hektar
Pemanenan	Rp 300.000.00 per 1 Ton
Pengumpulan dan Traspot	Rp 300.000.00 per1 Ton

Dari data tersebut, dapat dipahami bahwa keterlibatan masyarakat bukan hanya berdampak pada operasional perkebunan, melainkan juga secara langsung memberikan kontribusi terhadap penghasilan mereka. Sistem ini memperlihatkan adanya distribusi ekonomi yang lebih merata, mengurangi ketimpangan sosial, serta mendorong pemberdayaan masyarakat pedesaan secara nyata.

Dampak terhadap Kesejahteraan

Kesejahteraan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mencakup kondisi aman, tenteram, damai, makmur, dan terbebas dari berbagai gangguan atau kesulitan. Secara umum,

kesejahteraan bisa dimaknai sebagai taraf hidup yang lebih baik dibandingkan keadaan saat ini. Seseorang dikatakan hidup sejahtera apabila ia merasa puas, tidak kekurangan dalam hal-hal yang masih dapat dijangkau olehnya, memiliki ketenangan jiwa, serta batin yang terjaga. Ia juga merasa keadilan hadir dalam kehidupannya, dan terbebas dari penderitaan akibat kemiskinan maupun ancaman akan kemiskinan itu sendiri. (Mutiuddin, Amrullah, and Chasanah 2024)

Menurut Mosher (1987:6), unsur terpenting dalam kesejahteraan adalah pendapatan, karena berbagai aspek kesejahteraan rumah tangga sangat bergantung pada besarnya pendapatan yang dimiliki (WIRANDA 2025). Dari Hasil Wawancara dan Observasi terhadap 12 orang pekerja Pendapatan di perkebunan kelapa sawit memberikan dampak yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat di sekitar lokasi. Terjadi peningkatan pendapatan rumah tangga, yang tercermin dari membaiknya tingkat konsumsi serta bertambahnya kepemilikan aset keluarga. Banyak warga yang sebelumnya menganggur atau tidak memiliki pekerjaan tetap kini memperoleh penghasilan secara rutin, baik sebagai pekerja mingguan, pemanen buah sawit, maupun Pengumpulan dan Transportasi di perkebunan.

Pernyataan mengenai kontribusi perkebunan terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja diperkuat oleh beberapa informan lapangan. Bapak Kadim, salah satu pekerja di perkebunan mandiri, mengemukakan bahwa dari masa tanam hingga penumbangan yang memakan waktu hingga 30 tahun, serta pola panen yang berlangsung setiap dua minggu sekali, aktivitas perkebunan ini mampu memberikan tingkat kesejahteraan yang layak bagi para pekerjanya. Senada dengan hal tersebut, Mas Ari menyampaikan bahwa perkebunan ini memberikan manfaat finansial yang signifikan, yang menurutnya sangat kontras dengan kondisi ekonomi ketika ia bekerja di Pulau Jawa. Sementara itu, Bapak Carlam menegaskan bahwa kesejahteraan dalam sektor perkebunan sangat terasa karena adanya sistem pendapatan yang jelas dan terstruktur secara sistematis. Dari Pernyataan Beberapa orang tersebut dapat disimpulkan bahwa perkebunan kelapa sawit di Desa Tajurberas ini sangat Berkontribusi dalam mensejahterakan masyarakat di sekitar perkebunan.

5. Penutup

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi ekonomi kerakyatan pada perkebunan kelapa sawit di Desa Tajurberas telah memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Melalui keterlibatan langsung dalam proses produksi mulai dari pembukaan lahan hingga Panen masyarakat memperoleh pendapatan yang lebih stabil dan sistematis. Sistem kerja borongan yang diterapkan menciptakan rasa keadilan dan kekeluargaan antara pemilik kebun dan pekerja.

Peningkatan kesejahteraan terlihat dari bertambahnya penghasilan, berkurangnya pengangguran, dan meningkatnya aktivitas ekonomi lokal. Dengan demikian, perkebunan kelapa sawit di desa ini terbukti menjadi sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan. Namun, penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM tetap diperlukan agar manfaatnya berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Adhar, Fahrul, and Mirza Desfandi. 2024. "Dampak Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Perekonomian Warga Di Gampong Paya Baro Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya." *Pendidikan Geosfer* 9 (1): 2808–34. <https://doi.org/10.24815/jpg.v>.
- Anita, Anita. 2024. "EVEKTIVITAS KERJASAMA INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM PROGRAM HIDRILISASI KELAPA SAWIT PERIODE 2020-2021." *Salam (Islamic Economics Journal)* 5 (1): 25–37.
- Azzurri, Sandy Setya. 2024. "Strategi Pembangunan Sektor Pertanian Dan Ketahanan Pangan Berbasis Ekonomi Kerakyatan" 7: 23–30.

- BESSE DINI INDRIANI. 2025. "ANALISIS DAMPAK PERDAGANGAN GLOBAL KELAPA SAWIT TERHADAP KEBERHASILAN DAN KEBERLANJUTAN SUBSISTEM HULU AGRIBISNIS DI INDONESIA."
- Bhudianto, Wahyu. 2012. "Sistem Ekonomi Kerakyatan Dalam Globalisasi Perekonomian." *Jurnal Transformasi XIV* (1): 1–9.
- Hasid, H Zamruddin, S U Se, S E Akhmad Noor, M Se, and Erwin Kurniawan. 2022. *Ekonomi Sumber Daya Alam Dalam Lensa Pembangunan Ekonomi*. Cipta Media Nusantara.
- I A Pohan, A E Krisdayanti, D B Simanjuntak. 2019. "Rekonstruksi Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta." *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan 4* (1): 21–31. <http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jipp/article/viewFile/859/562>.
- Ilmiah, Jurnal, Ekonomi Dan, Lulu Khulwatun Iffah, U I N Prof, K H Saefuddin Zuhri, Mahardika Wahyu Pradana, and Ulfatus Sofiah. 2025. "Implementasi Teori Keunggulan Komparatif Dalam Kebijakan Perdagangan Indonesia : Studi Kasus Sektor Pertanian Kelapa Sawit" 3 (1): 29–36.
- Ismail, Abdul Rahim, Wan Mohd, Yusof Wan, Ahmad Iqbal, Mohd Fadzli, Mohamad Iqbal, and Mohd Kasim. 2024. "REEVALUATION OF MOHAMMAD HATTA ' S ECONOMIC DEVELOPMENT IDEAS IN THE CONTEMPORARY REALITY OF THE MUSLIM ECONOMY IN NUSANTARA" 33 (6).
- Kurniadinata, Odit Ferry, and Yus Alwi Rahman. 2025. *Empat Dekade Kelapa Sawit Di Kalimantan Timur: Kisah Pertumbuhan Dan Tantangan Berkelanjutan*. Deepublish.
- Mutiuddin, Ach Muhandis, Ahmad Afif Amrullah, and Uswatun Chasanah. 2024. "Analisis Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Di Lazisnu Jawa Timur." *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam 5* (1): 64–81.
- Nata, Mada Angga Dwi, and Haryono Haryono. 2022. "Implementasi Ekonomi Kerakyatan Berbasis Ekonomi Digital Untuk Membangkitkan Umkm Pada Masa Pandemi Covid 19." *PROMOSI (Jurnal Pendidikan Ekonomi) 10* (1): 38–47. <https://doi.org/10.24127/pro.v10i1.5410>.
- Parkah, Diana Indah, Syamsul Huda, and Putra Perdana. 2025. "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Luas Panen Padi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 25* (1): 115–21.
- Sinta; Agni Destrian. 2025. "Konsep Ekonomi Kerakyatan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah," 18. <https://doi.org/10.11111>.
- Styaningrum, Farida. 2021. "Konsep Sistem Ekonomi Kerakyatan Dalam Pemberdayaan Umkm Indonesia." *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana 10* (8): 565. <https://doi.org/10.24843/eeb.2021.v10.i08.p01>.
- Sugeng Riyadi dan Dewi Laela Hilyatin. 2021. "TRANSFORMASI EKONOMI ISLAM DALAM SISTEM EKONOMI KERAKYATAN." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam 06*: 56.
- Sugiyono. 2019. *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D*. Sutopo. Bandung: ALFABETA, cv | Hotline:
- Triono, Tomi Agus. 2025. "Konsep Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal : Hamemayu Hayuning Bawana Di Daerah Istimewa Yogyakarta" 3.
- WIRANDA, WAHYU A Z I. 2025. "PERAN INDUSTRI BATU BATA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS DI DESA LIDAH TANAH KECAMATAN PERBAUNGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI)." Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara.
- Zahra Nurul Septila, Zahra. 2025. "PENGARUH KOMPENSASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI TRAVEL PT. NIAT SUCI KEBAITULLAH." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.